BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) yang berarti orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran).¹

Definisi lain menyebutkan bahwa preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.²

Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan disini bisa berbentuk materi dan juga ketidak-sesuaian sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat, tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok

¹Ida Bagus Pujaastawa dalam Ali Mustofa Akbar. *Premanisme Dalam Teori Labeling*. 2011, hlm. 4.

²Rahmawati, L. *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)*. Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa, 2002, hlm. 14.

dalam struktur masyarakat tertentu.

Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat dan kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. R. Owen dalam bukunya “*the book of the new moral world*” mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan orang menjadi jahat, sehingga tidak dipungkiri bahwa karena hal itulah sekarang marak terjadinya kejahatan.³

Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Sebagai ilustrasi dapat dipaparkan dalam bab ini aksi premanisme di terminal bus adalah melakukan pemerasan terhadap sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal. Preman di pasar melakukan pemerasan dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan. Dalam memperebutkan wilayah kekuasaan para preman sering melakukan kekerasan terhadap preman yang lain sehingga terjadilah peristiwa hukum seperti penganiayaan yang bisa berakibat luka atau matinya orang. Kekerasan itu terjadi dipicu dengan adanya target dari bos preman yang sering diistilahkan

³Mustofa, Muhammad, *Kriminolog*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 15.

dengan “mengejar setoran”. Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.⁴

Preman ingin “mengejar setoran”, sering terjadi kekerasan yang berujung korban luka-luka dan dipaksa untuk membayar “jatah preman”, hal ini di kenakan pidana hukum, dalam buku KUHP yang ditulis oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa:

“Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.⁵

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Haryadi mengenai sanksi pidana, ialah:

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Setelah penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembedaan dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.⁶

Peristiwa hukum berupa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para preman ini pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Kitab 3 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 KUHP yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pelaku-pelaku kejahatan dewasa ini pun mengalami peningkatan dan pergeseran dari yang semula hanya pelaku kejahatan konvensional (kejahatan warungan) telah

⁴Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 855.

⁵Rahmi Zilvia, & Haryadi, H. (2020). “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law 1* (1), hlm. 96-109. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>.

⁶Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dalam perspektif Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139.

meningkat dan bergeser kepada para pelaku kejahatan yang berasal dari orang-orang terpendang dan berstatus sosial tinggi juga atau yang dikenal dengan “kejahatan kerah putih” (*white collar crime*).⁷

Dalam ketentuan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut:

- (1)Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2)Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja. Pemerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan lainnya yang sering terjadi dilakukan oleh preman.

Tindak pidana pemerasan diatur dalam buku ke II Bab ke XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam Pasal 368 KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, yaitu dengan istilah pemerasan (*afpersing*) dan pengancaman (*afdreiging*), akan tetapi karena kedua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.⁸ Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHP di atas, menurut JCT Simorangkir, dkk., dalam penjelasan Pasal 368 KUHP, suatu tindak pidana dinamakan “pemerasan dengan kekerasan”, apa yang dilakukan oleh si pelaku ialah:

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

⁷Wendy, Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 2020, hlm. 23-37. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535>.

⁸Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 2014, hlm. 164.

- b. Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain.
- c. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan melawan hukum.⁹

Tindak pidana pemerasan dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksa, maka preman tersebut dapat dijerat dengan pasal pemerasan dan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan”. Selanjutnya yang dilakukan oleh pemeras antara lain sebagai berikut :

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁰

Memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginannya sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

⁹R.Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, 2012, hlm. 387.

¹⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 243.

Pemerasan merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri.

Dapat dibedakan mengenai ancaman dengan pemerasan, ancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 369 Ayat 1 bahwa :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Kekerasan diatur pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

Membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Kota Jambi tidak terlepas dari tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman. Beberapa kasus yang pernah terungkap, yaitu: dua pemuda dicituk lantaran memalak di kawasan Jalan Baru Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur. Mereka adalah MA (23) dan UF (35) Keduanya warga Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

Kedua pria itu ditangkap Tim Opsnal Satreskrim Polresta Jambi dalam Operasi Penyakit Masyarakat pada hari sabtu 4 April 2020. MA dan UF melakukan pungutan liar kepada sopir-sopir truk yang melintas di seputaran Jalan Baru itu. Selain pelaku, petugas juga mengamankan

sejumlah barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 145.000 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dan 2 (dua) batang besi¹¹

Kasus pemerasan lainnya yang dilakukan oleh preman yaitu pada hari rabu 8 April dinihari, Anggota Polsek Jelutung Polresta Jambi berhasil menangkap lima orang pemuda yang melakukan aksi premanisme dan pungutan liar di sejumlah kawasan sejumlah titik di kawasan wilayah kerja kepolisian Jelutung. Kelima pelaku premanisme dan pungli yang diamankan polisi adalah warga Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung Kota Jambi yakni HMM (31), AS (23), WKS (26), SP (18), dan KS (29) yang diamankan dari beberapa lokasi saat digelar razia oleh petugas, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) Bilah Sajak, 1 (satu) Mercon dan 1 (satu) Tongkat Pemukul.¹²

Adanya aksi preman ini masyarakat merasa tidak nyaman dan resah. Premanisme yang ada di Kota Jambi membuat masyarakat sangat tidak aman. Keadaan seperti ini Polresta Jambi tidak bisa berdiam diri. Polresta Jambi akan melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu

¹¹Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Jambi Bapak Kompol Handres, S.H., S.I.K. tanggal 07 Juni 2021.

¹²Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Jambi Bapak Kompol Handres, S.H., S.I.K.tanggal 07 Juni 2021.

akan mengulangi kembali perbuatannya. Namun demikian kejahatan adalah kenyataan yang normal dan perlu dalam masyarakat. Kejahatan bukan sesuatu yang abnormal, patologis atau kurang sempurna manusia.

Tabel
Rekapitulasi Jumlah Data Pemerasan di Wilayah Hukum Polresta Jambi Pada Tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Tindakan	Jumlah Laporan dan Data preman Jalanan
1	2019	Pemerasan	11
2	2020	Pemerasan	7
3	2021	Pemerasan	1

Sumber: *Kasat Reskrim Polresta Jambi*

Aksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.¹³ Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk dikaji permasalahan penanganan premanisme oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan tugas dan kewenangannya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Kota Jambi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam suatu proposal skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Pemerasan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Jambi”**.

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Persada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 4.

A. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemerasan oleh preman di wilayah hukum Polresta Jambi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya pemerasan oleh preman di wilayah hukum Polresta Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemerasan oleh preman di wilayah hukum Polresta Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya pemerasan oleh preman di wilayah hukum Polresta Jambi.

2. Manfaat penelitian

Selain dari pada tujuan penelitian ada juga manfaat penelitian, adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi akademis penelitian ini dimaksudkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum pidana tentang faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemerasan oleh preman di wilayah hukum Polresta Jambi.
- b. Dilihat dari segi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para pelaksana penegak hukum secara khusus dalam meningkatkan kinerja kerjanya dan menyadarkan masyarakat mengenai upaya penanggulangan terhadap terjadinya pemerasan oleh preman di wilayah hukum Polresta Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih mempermudah pemahaman maksud dari penulisan proposal skripsi ini, maka penulis akan memperjelas pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal skripsi, antara lain:

1. Upaya penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan yaitu segala suatu syarat untuk mencapai suatu maksud atau melakukan sesuatu untuk mencapai jalan serta mengisi yang akan terjadi, dengan melakukan sarana penal dan non penal.¹⁴

2. Pemerasan

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang adapada Pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*afpersing*” atau “pemerasan”.¹⁵ Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.

3. Preman

Preman adalah orang/individu dan atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang

¹⁴SR. Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 215.

¹⁵R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Balai Pustaka, 2005, hlm. 7.

terkena pengaruh keberadaannya. Karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang, namun karena dia melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis, agar mereka mau mendukung kebutuhannya.¹⁶

Menurut Ida Bagus Pujaastawa, preman berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya.¹⁷ Sikap, tindakan, perilaku para preman itulah yang disebut sebagai premanisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua entri:

- 1) Preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan
- 2) Preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain).¹⁸

Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain.

¹⁶Anonim (Tanpa Nama), *Peran Polri Dalam Menanggulangi Premanisme Di Karanganyar*, <http://eprints.ums.ac.id/32691/2/Bab%201.pdf>, tanggal diakses 10 November 2019.

¹⁷Everdnandya, *Premanisme di Indonesia*, <https://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>, tanggal diakses 10 September 2021.

¹⁸Tim Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 324.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu:

- a. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendirisendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas;
- b. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan;
- c. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan;
- d. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.¹⁹

Jadi keseluruhan konsep yang dijelaskan, penulis menjabarkan sesuatu kerangka konseptual sesuai dengan judul skripsi, yaitu hasil pandangan mengenai segala suatu syarat untuk mencapai suatu maksud atau melakukan sesuatu untuk mencapai jalan serta mengisi yang akan terjadi, dengan melakukan sarana penal dan non penal terhadap uang yang diminta secara paksa oleh oknum preman yang tidak ada kaitan resminya dengan operasional suatu usaha di wilayah hukum Polresta Jambi.

E. Landasan Teoretis

Kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari adanya kejahatan. Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan (hukuman) dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral²⁰. Sementara Kartini Kartono menyatakan:

Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang).²¹

Menurut Gerson W. Bawengan dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu:

¹⁹Neta S. Pane. *Model-Model Premanisme Modern*. Presidium Indonesia Police Watch. <http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com>, 2011. hlm. 10.

²⁰B. Simanjuntak dan IL. Pasaribu, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 45.

²¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 1.

Pengertian secara praktis, kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian. Pengertian secara religius, kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka. Pengertian secara yuridis, kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP.²²

1. Teori Penanggulangan

Upaya penanggulangan yang ditempuh terhadap tindak pidana adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pencegahan (preventif)

Hal ini dilakukan sebelum tindak pidana terjadi, yang mana penanggulangan dengan bentuk preventif ini dilakukan dengan mengadakan himbauan-himbauan kepada masyarakat luas melalui media massa seperti media cetak (surat kabar) maupun media elektronik berupa radio, televisi.

b. Tindakan (Represif)

Hal ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang mana penanggulangan dengan bentuk represif dilakukan dengan cara menangkap pelaku yang ketahuan melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dikenakan hukuman pidana terhadapnya. Agar efektif dan berdaya guna, upaya ini dilakukan dengan saling koordinasi antar aparat penegak hukum di wilayah Indonesia.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidananya. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum

²²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 27.

pada era modernisasi dan globalisasi saat ini agar keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas dalam masyarakat dapat selalu terjaga.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan :

Secara umum arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang diterapkan dalam kaidah kaidah yang dan mengejawantah dan tindak lanjut sebagai rangku penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, dan mempertahankan kelestarian hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi akan memiliki unsur pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.²³

Penegakan hukum pidana dirumuskan dalam suatu kebijakan penegakan hukum yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:²⁴

- (1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- (2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- (3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Adapun terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, yang dapat menjadi acuan dari keefektifan suatu penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Serangan*, Cetakan ke-4 , Grup Media Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hal. 79.

²⁵Soerjono Soekamto, *Op.cit.*, hal. 8

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Polresta Jambi.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi Penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh di lapangan mengenai upaya penanggulangan terhadap terjadinya pungutan liar oleh preman jalanan di wilayah hukum Polresta Jambi.

3. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat dan mengenai upaya penanggulangan terhadap terjadinya pungutan liar oleh preman jalanan di wilayah hukum Polresta Jambi.

Metode penelitian yuridis empiris bebas nilai, maksudnya tidak dipengaruhi oleh subjek peneliti. sebab menurut penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karenanya ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukuman tidak oleh dipengaruhi oleh penelitian pribadi dari peneliti.²⁶

4. Sumber Data

- a. Data primer, diperoleh melalui penelitian yang dilakukan penulis di Kota Jambi;
- b. Data sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan baik perpustakaan fakultas, perpustakaan universitas, maupun perpustakaan wilayah;
- c. Data Tersier, diperoleh dari kamus hukum dan kamus umum.

5. Alat pengumpulan data

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.124.

Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara yakni sebagai berikut :

- a. Kasat Reskrim Polresta Jambi Bapak Kopol Handres, S.H., S.I.K.
- b. Penyidik Polresta Jambi Bapak Briptu Aldi.
- c. Penyidik Polresta Jambi Briptu Akbar Kasi Mukmin
- d. Pelaku tindak pidana pemerasan berinisial UF (35).
- e. Pelaku tindak pidana pemerasan berinisial MA (23).

6. Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah penyidik Polresta Jambi dan Pelaku preman jalanan. Tata cara penarikan sampel yang dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu ditujukan kepada Reskrim Polresta Jambi, penyidik Polresta Jambi, pelaku tindak pidana pemerasan.

7. Analisis data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian kemudian disajikan secara kualitatif, dan hasilnya disampaikan secara deskriptif dengan didukung tabel frekuensi.

G. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran secara jelas dari seluruh pembahasan skripsi ini penulis secara sistematis menyusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut: